

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Aminanto, Kif, 2017, *Politik Hukum Pidana 1: Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember Katamedia, Jember.
- Anwar, Yesmil, *et.al.*, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Arbijoto, 2000, *Kebebasan Hakim (Refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegiosus)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta.
- _____, 2009, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, *et.al.*, 2018, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bima Cipta, Jakarta.
- Budiono, S., 2008, *Panduan Kegiatan Sadar Hukum Mengenai Korupsi, Kolusi, Nepotisme Bagi Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat*, LPPNRI, Jakarta.

- Chaeruddin, *et.al.*, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 2018, *Edisi Revisi Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang.
- D., Moh. Mahfud M., 2018, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Danil, Elwi, 2011, *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Effendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Fajar, Mukti, *et.al.*, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Greenberg, Theodore S., *et.al.*, 2009, *Stolen Asset Recovery*, World Bank, Washington DC.
- Hamzah, Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2011, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Eva, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hatta, Moh., 2014, *KPK Dan Sistem Peradilan Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin, 2016, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Konstitusi*, Setara Press, Malang.
- Isra, Saldi, 2019, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Rajawali Pers, Depok.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.
- Kaelan, 2017, *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen: Kajian Filosofis – Yuridis*, Badan Pengkajian MPR dengan Paradigma, Yogyakarta.
- Kamil, Ahmad, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kanter, E.Y., *et.al.*, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Klitgaard, Robert, 1998, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Latif, Abdul, *et.al.*, 2018, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, Mochtar, *et.al.*, 1993, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mambaya, Marthinus, 2015, *Kesesatan Peradilan Perspektif Hukum dan Etika Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Mappiase, Syarif, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Marwan, *et.al.*, 2009, *Kamus Hukum Cetakan I*, Reality Publisher, Surabaya.

Mertokusumo, Soedikno, *et.al.*, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

_____, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad, Rusli, 2007, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

_____, *et.al.*, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.

_____, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2015, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.

Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

_____, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Pardede, Rudi, 2017, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Prajonggo, Tjandra Sridjaja, 2010, *Sifat Melawan Hukum dari Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1990, *Peranan Pengawasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, Semarang.
- Prasetyo, Teguh, *et.al.*, 2012, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Priyono, B. Herry, 2018, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sadeli, Wahyudi Hafiludin, 2010, “Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sinaga, Dahlan, 2015, *Kemandirian Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suhartoyo, 2019, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian: Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Supandriyo, 2019, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Indonesia: Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Suratman, *et.al.*, 2015, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

_____, *et.al.*, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

_____, *et.al.*, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Syamsu, Muhammad Ainul, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Syamsuddin, Azis, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsudin, M., 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Teguh, Harry Pratamadan, *et.al.*, 2016, *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung.

Toegarisman, M. Adi, 2016, *Pemberantasan Korupsi Dalam Paradigma Efisiensi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wheare, K.C., 1975, *Modern Constituions*, Oxford University Press, London.

Yanuar, Purwaning M., 2015, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

C. Karya Ilmiah

Eddy O.S. Hiariej, 2012, "Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi". *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Harwiadi, 2017, "Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Madusira, Muhammad Aras, 2011, “Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nasution, Rizkisyah Karoen, “Permasalahan Pidana Uang Pengganti Terkait Teori Pidanaan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Simatupang, Benget Hasudungan, 2017, “Optimalisasi Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sitompoe, Hotma P.D., 2016, Pelaksanaan Asset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Indonesia, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Supandriyo, 2018, Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Jurnal

Mahmud, Ade, “Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Volum 3, Nomor 2, Desember 2017.

Pilli, Inggrid, “Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Edisi 4, Nomor 6, Agustus 2015.

Rizki, Aghisni Kasrota, “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Putusan Terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Atas Putusan No. 28-K/PM.II-10/AD/IV/2013 Di Mahkamah Militer II-10 Semarang)”, *Unnes Law Journal*, Volum 4, Nomor 1, Juni 2015.

Saputra, Refki, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”, *Integritas Jurnal Antikorupsi*, Volum 3, Nomor 1, Maret 2017.

Sinaga, Christine Juliana, “Kajian Terhadap Pidana Penjara Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Wawasan Yuridika*, Volum 1, Nomor 2, September 2017, hlm. 201.

Supriyadi, *et.al.*, “Masa Depan Hukum Pengembalian Aset Kejahatan Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volum 7, Nomor 4, Mei 2010.

E. Internet

“Ini Harta Djoko Susilo Senilai Rp 200 Milyar”, <https://nasional.kompas.com/read/2013/08/21/2204513/Ini.Harta.Djoko.Susilo.Senilai.Rp.200.Miliar>, diakses pada tanggal 6 April 2019.

“Jejak Korupsi Shelter Tsunami Banten Hingga Uang Segunung Dibalikin”, <https://news.detik.com/berita/4396392/jejak-korupsi-shelter-tsunami-banten-hingga-uang-segunung-dibalikin>, diakses pada tanggal 6 April 2019.

“Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Rp 203,9 Triliun”, <https://beritagar.id/artikel/berita/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia-rp2039-triliun>, diakses pada tanggal 6 April 2019.

KBBI Online, “Subsider”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/subsider>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019.

“Riset ICW: Tren Vonis Ringan Bagi Koruptor Berlanjut Pada 2018”, <https://tirto.id/riset-icw-tren-vonis-ringan-bagi-koruptor-berlanjut-pada-2018-dngr>, diakses pada 2 September 2019.